

PELUNCURAN

TRANSPARENCY IN CORPORATE REPORTING BADAN USAHA MILIK DAERAH (TRAC BUMD)

Penilaian Antikorupsi di BUMD pada 5 Provinsi

Jakarta, 17 Mei 2023

Transparency
in Corporate
Reporting
Penilaian
terhadap
Badan Usaha
Milik Daerah
(BUMD)



KERUGIAN DI BUMD

BUMD memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Namun, BUMD belum memberikan kontribusi seperti yang diharapkan. Masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi BUMD seperti kinerja yang belum memuaskan, **adanya kerugian yang terus menerus**, dan masih **terjadinya praktik korupsi di BUMD**.

MINIM TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS BUMD

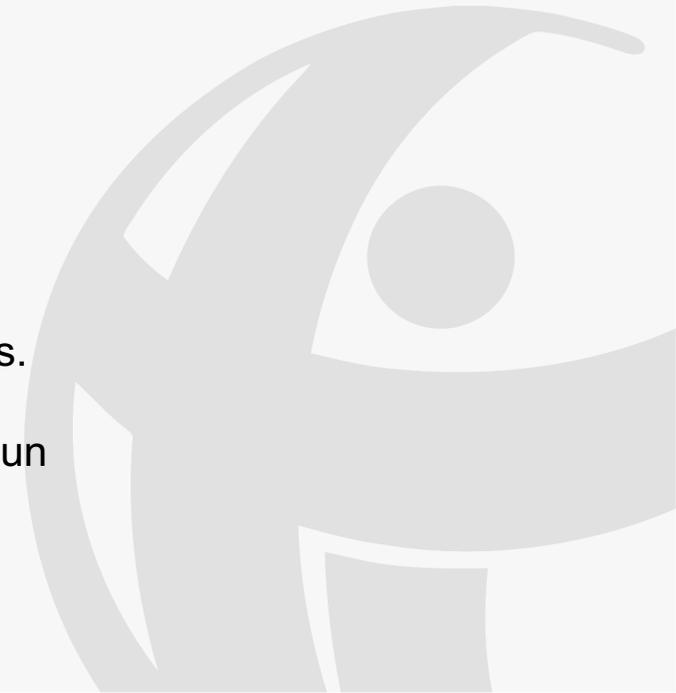
Belum baiknya tata kelola dan akses informasi yang disajikan melalui situs perusahaan yang dapat diakses oleh publik.

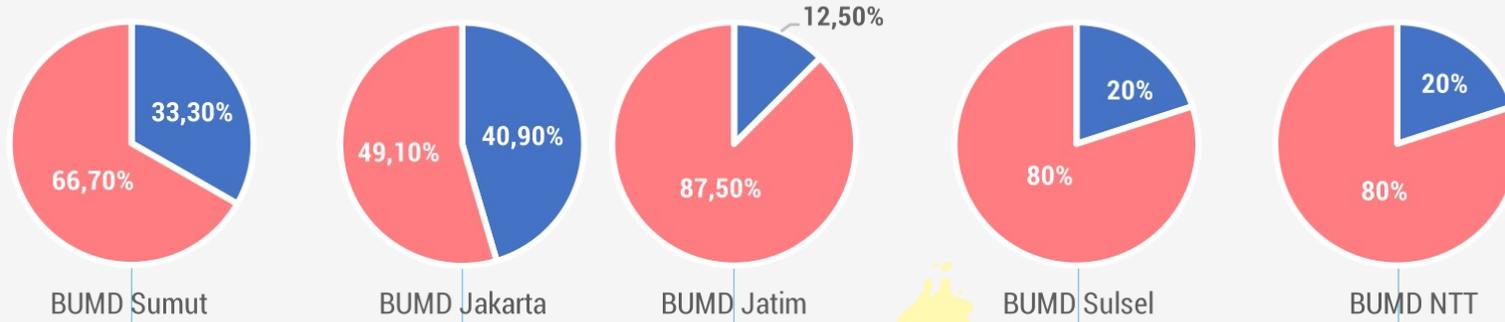
RANGKAP JABATAN DI BUMD

Ditemukannya pejabat publik yang merangkap jabatan di BUMD & Komisaris yang merangkap di 2 perusahaan.

BURUKNYA UJI KELAYAKAN PIMPINAN BUMD

- Minimnya aspek uji integritas dalam melakukan praktik uji tuntas.
- *Fit and proper test* hanya formalitas
- Terdapat aturan bahwa terdapat unsur Pemerintah Pusat maupun Provinsi / Kab, Kota yang dapat menjadi Pimpinan BUMD
- Pansel dari unsur pemda terlalu dominan

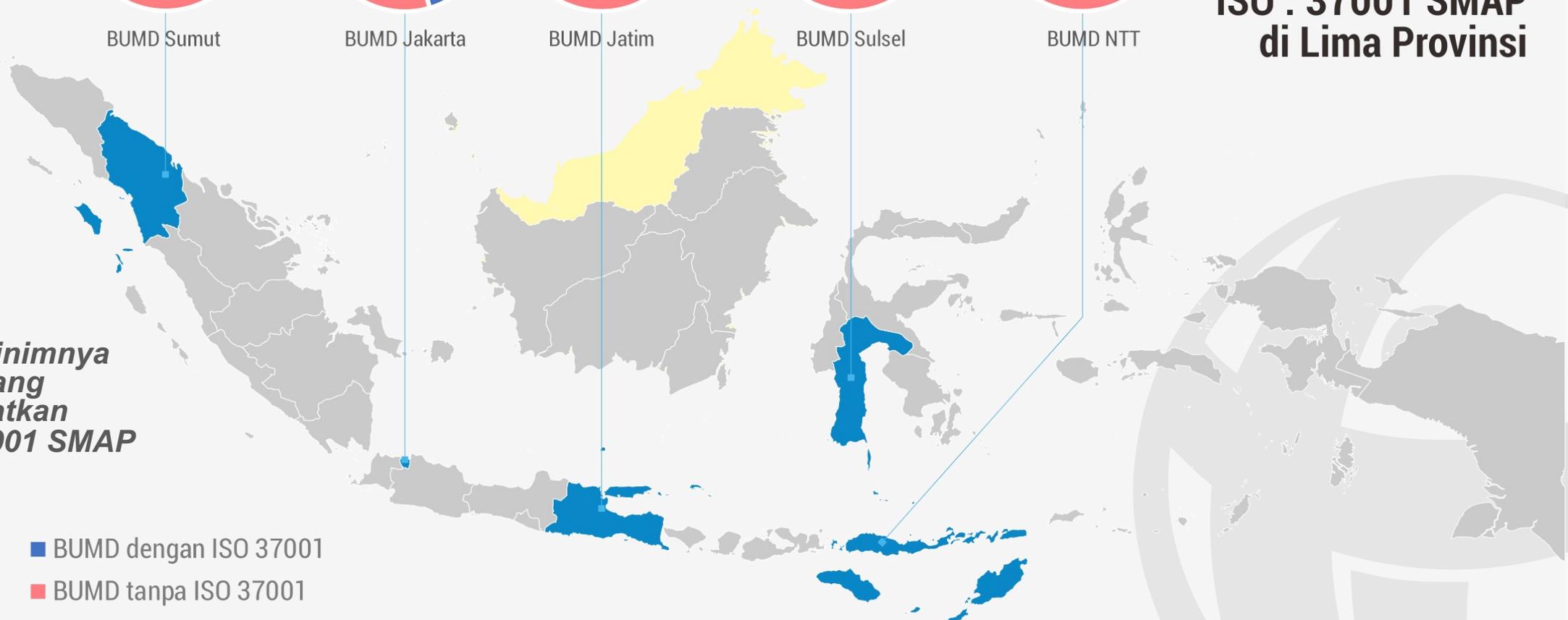




BUMD dengan ISO : 37001 SMAP di Lima Provinsi

Masih Minimnya BUMD yang Mendapatkan ISO : 37001 SMAP

- BUMD dengan ISO 37001
- BUMD tanpa ISO 37001



TRAC

Instrumen alat penilaian yang dimiliki oleh Transparency International (TI) untuk menilai transparansi kebijakan dan program antikorupsi perusahaan.

BUMD

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. (UU No. 23 Tahun 2015 dan PP 54 Tahun 2017).

TUJUAN

Menilai kepatuhan dari prinsip antikorupsi BUMD di lima provinsi. Penilaian dilakukan terhadap 47 BUMD di tingkat provinsi dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi yang disajikan di laman perusahaan dan/atau sumber-sumber informasi lain yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

METODOLOGI

TRAC BUMD terdiri atas
6 Dimensi (Aspek Pencegahan Korupsi) dalam **24 indikator** :

- (1) Komitmen antikorupsi;
- (2) Ruang lingkup kebijakan antikorupsi perusahaan;
- (3) Pengungkapan kebijakan internal,
- (4) Pengangkatan pimpinan, pemberian donasi politik dan kebijakan program CSR;
- (5) Sistem pelaporan pelanggaran, perlindungan dan kerahasiaan pelapor; dan
- (6) Program pelatihan dan pemantauan program antikorupsi.

- Identifikasi Politically Exposed Persons (PEPs)
- Rangkap jabatan di BUMD

**Penyusunan metodologi
dan kuesioner** – Desk
research, FGD experts
(Juli – September 2022)

Proses penilaian
(Des 22 – Jan 23)

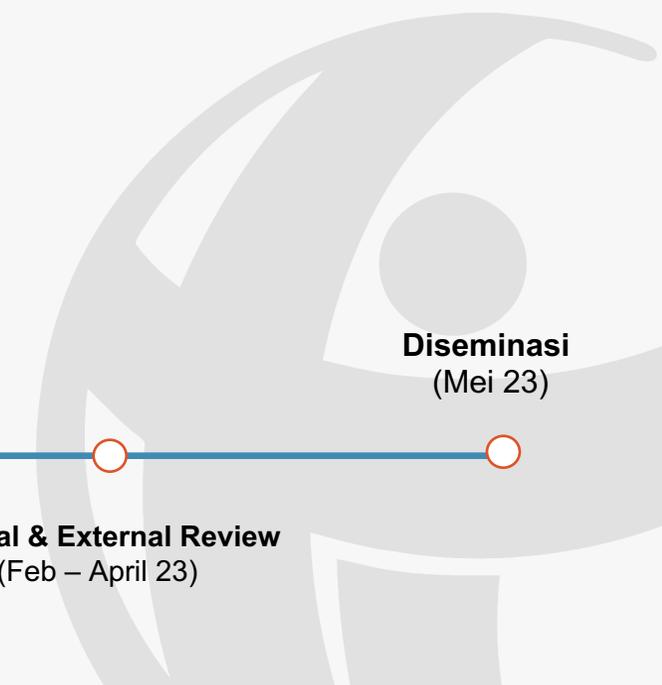
Penulisan Laporan
(Feb – Maret 23)

Diseminasi
(Mei 23)

Uji Coba Penilaian
(Oktober 2022)

**Umpan balik dan Input dari pihak
yang dinilai (Jan 2023)**
2/47 mengirimkan *feedback*

Internal & External Review
(Feb – April 23)



PERINGKAT TRAC BUMD DI 5 PROVINSI



Rank	Nama Perusahaan	Provinsi	Skor (x10)	Rank	Nama Perusahaan	Provinsi	Skor (x10)	Rank	Nama Perusahaan	Provinsi	Skor (x10)
1	PT Transportasi Jakarta	Jakarta	7,29	17	PT GMTD	Sulsel	3,13	33	PT Grahasari Suryajaya	Jakarta	0,42
2	PT MRT	Jakarta	7,08	18	Perumda Dharma Jaya	Jakarta	2,92	34	PT Cemani Toka	Jakarta	0,42
3	BPD Bank Sumut	Sumut	6,88	19	PT KIMA	Sulsel	2,50	35	PT Jamkrida Jatim	Jatim	0,42
4	PT SIER	Jatim	6,67	20	PT Pakuan	Jakarta	2,50	36	PT Panca wira usaha Jatim	Jatim	0,42
5	PT JIE Pulogadung	Jakarta	6,46	21	PT Askrida	NTT	2,50	37	PT Flobamor	NTT	0,42
6	BPD Bank Jatim	Jatim	6,46	22	PT Delta Jakarta	Jakarta	2,29	38	PT Jamkrida NTT	NTT	0,42
7	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	Jakarta	6,46	23	BPD Bank Sulselbar	Sulsel	2,29	39	PT Aneka Industri Jasa	Sumut	0,10
8	PT Food Station Tjipinang	Jakarta	6,46	24	PT Pembangunan Jaya	Jakarta	2,29	40	PT JIExpo Kemayoran	Jakarta	0,00
9	PT Bank DKI	Jakarta	6,25	25	PDAM Tirtanadi Sumut	Sumut	1,46	41	BPR Jatim	Jatim	0,00
10	BPD Bank NTT	NTT	6,04	26	PD Pal Jaya	Jakarta	1,25	42	Jatim Graha Utama	Jatim	0,00
11	PT Jakpro	Jakarta	5,83	27	PT Jaktourisindo	Jakarta	1,04	43	PT Air Bersih Jawa Timur Perseroda	Jatim	0,00
12	PD Pasar Jaya	Jakarta	5,83	28	PT Dhirga Surya Sumut	Sumut	0,63	44	PT Jatim Krida Utama	Jatim	0,00
13	PT Pembangunan Jaya Ancol	Jakarta	5,63	29	PT Pembangunan Prasarana Sumut	Sumut	0,63	45	PT Sulsel Citra Indonesia Perseroda	Sulsel	0,00
14	PT Kawasan Berikat Nusantara	Jakarta	5,63	30	PT Petrogas Jatim Utama	Jatim	0,63	46	PT Jamkrida Sulsel	Sulsel	0,00
15	PAM Jaya	Jakarta	4,79	31	PT Perkebunan Sumatera	Sumut	0,42	47	PT Kawasan Industri Bolok	NTT	0,00
16	PT Jamkrida Jakarta	Jakarta	3,96	32	PT Ratax Media	Jakarta	0,42				

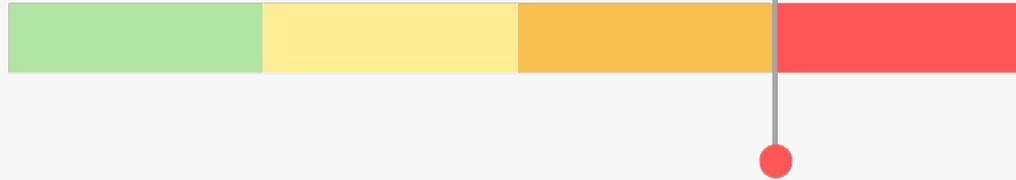


Nilai Tertinggi
7,29



Nilai Rerata
2,73

Sangat Baik



Sangat Buruk

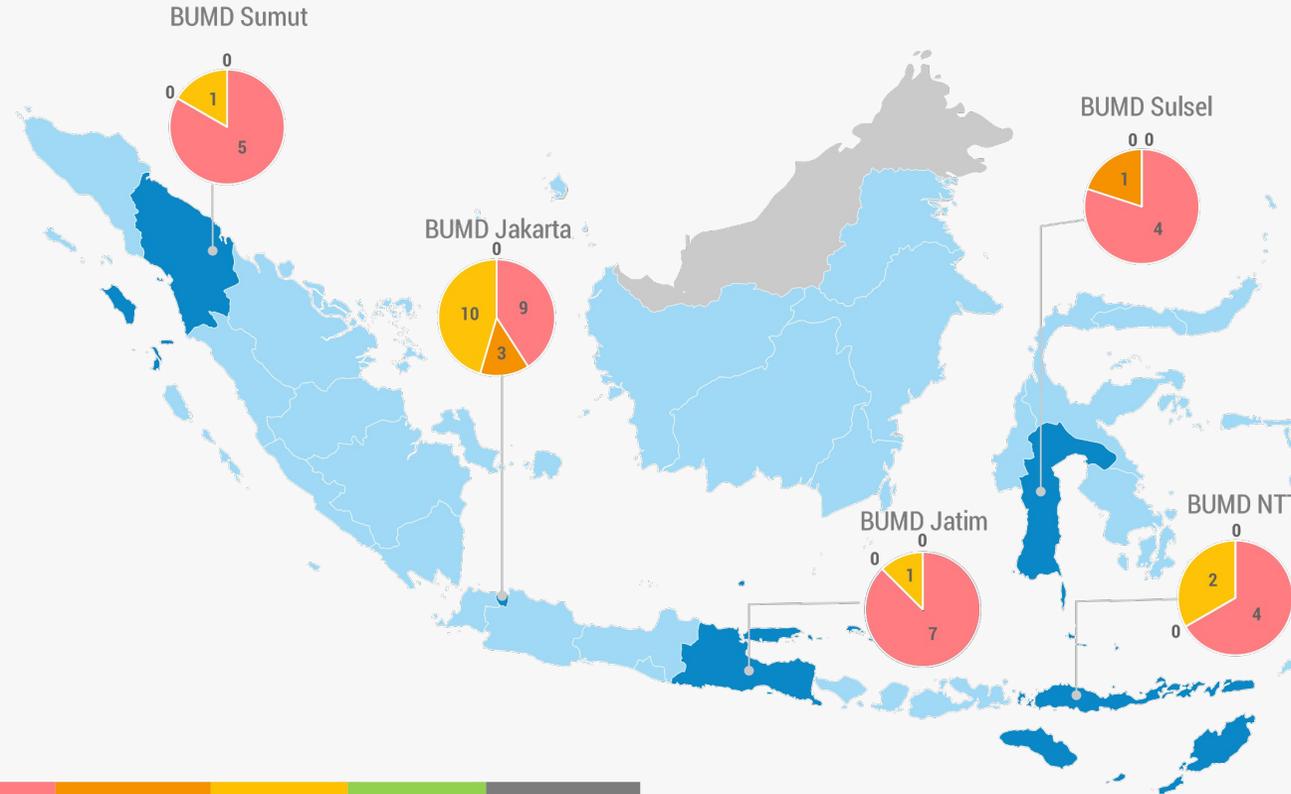
**RATA-RATA SKOR
DARI 47 BUMD**

Nilai Terendah
0

PT Jamkrida Sulsel
PT Sulsel Citra Indonesia
PT Kawasan Industri Bolok
PT Jakarta International Expo Kemayoran
PT Air Bersih Jawa Timur
PT Jatim Grha Utama
PT jatim Krida
PT BPR Jatim

PENILAIAN BUMD DI 5 PROVINSI

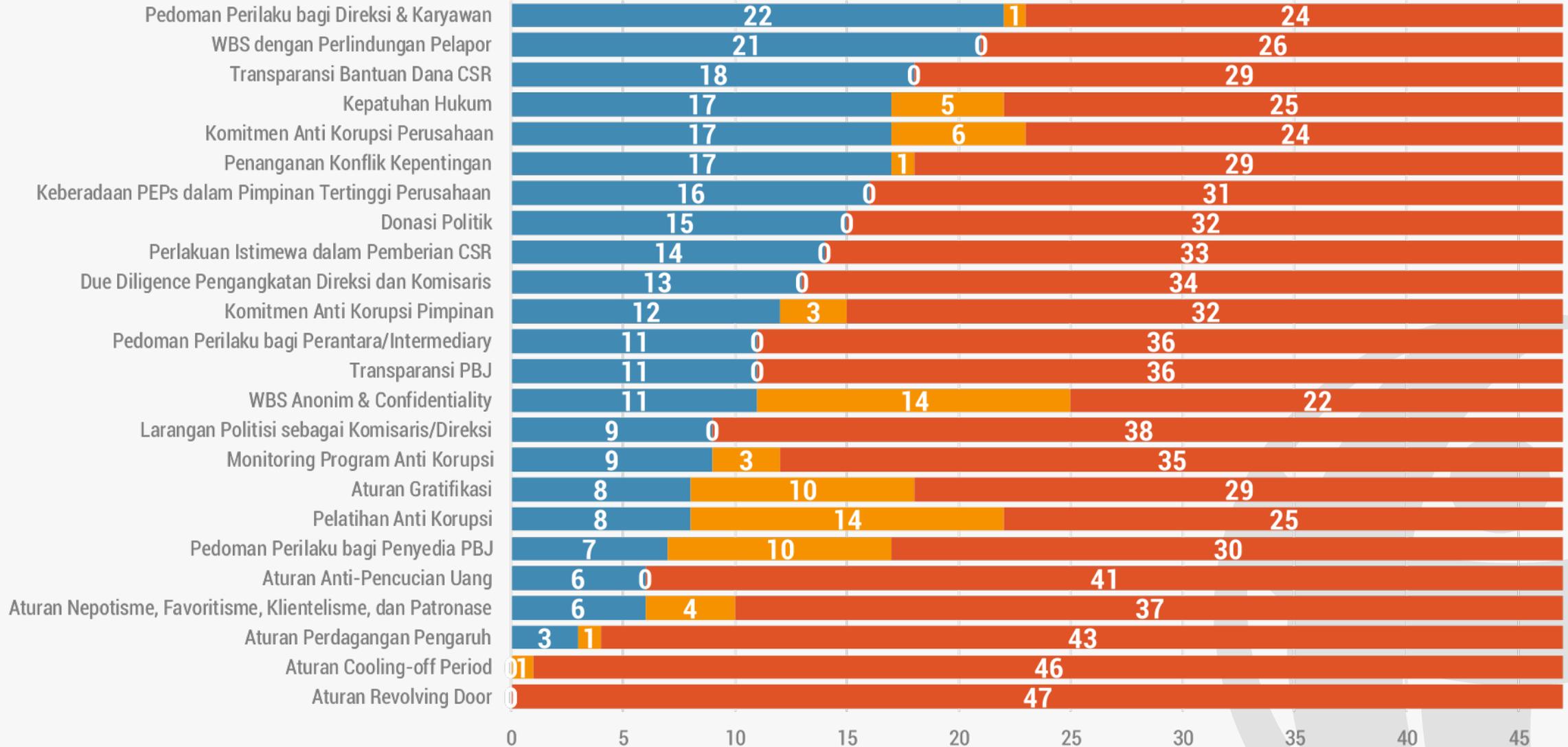
- Buruk
- Cukup Buruk
- Cukup Baik
- Baik



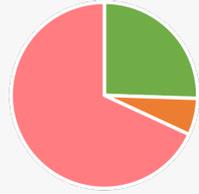
Provinsi	0,00-2,50	2,51-5,00	5,01-7,50	7,51-10,00	Jumlah
	Buruk	Cukup Buruk	Cukup Baik	Baik	
Sumut	5 (83,3%)	0 (0,0%)	1 (16,7%)	0 (0,0%)	6 (100,0%)
DKI Jakarta	9 (40,9%)	3 (13,6%)	10 (45,5%)	0 (0,0%)	22 (100,0%)
Jatim	7 (77,8%)	0 (0,0%)	2 (22,2%)	0 (0,0%)	9 (100,0%)
Sulsel	4 (80,0%)	1 (20,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	5 (100,0%)
NTT	4 (80,0%)	0 (0,0%)	1 (20,0%)	0 (0,0%)	5 (100,0%)
Jumlah	29 (100%)	4 (100%)	14 (100%)	0 (100%)	47 (100,0%)

PROGRAM ANTIKORUPSI

■ Ya ■ Sebagian ■ Tidak



DIMENSI 1: KOMITMEN ANTIKORUPSI



Komitmen Antikorupsi Pimpinan Perusahaan



Komitmen Patuh Perundang-Undangan



Komitmen AntiKorupsi Perusahaan

■ Ya
■ Sebagian
■ Tidak

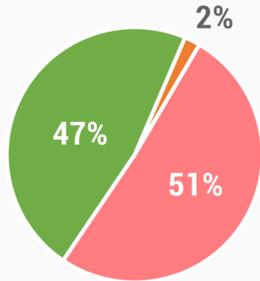
No	Pertanyaan	Ya	Sebagian	Tidak	Jumlah
1.	Komitmen Antikorupsi Pimpinan Perusahaan	12 (25,5%)	3 (6,5%)	32 (68,0%)	47 (100,0%)
2.	Komitmen Patuh Perundang-Undangan	17 (36,2%)	5 (10,6%)	25 (53,2%)	47 (100,0%)
3.	Komitmen Anti Korupsi Perusahaan	17 (36,2%)	6 (12,8%)	24 (51,0%)	47 (100,0%)

Highlight :

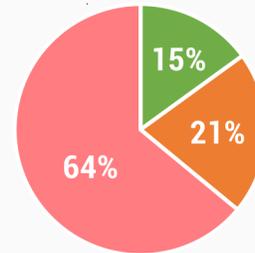
Komitmen Antikorupsi BUMD di lima provinsi cukup buruk.

DIMENSI 2: KEBIJAKAN ANTIKORUPSI PERUSAHAAN

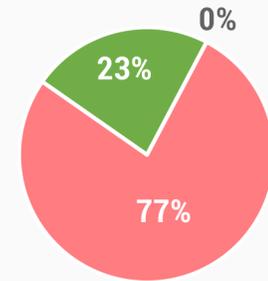
Pedoman Perilaku bagi Direksi & Karyawan



Pedoman Perilaku bagi Penyedia Barang & Jasa



Pedoman Perilaku bagi Perantara/Intermediary



No	Indikator	Ya	Sebagian	Tidak	Jumlah
1.	Pedoman Perilaku bagi Direksi dan Karyawan	22 (47%)	1 (2%)	24 (51%)	47 (100%)
2.	Pedoman Perilaku bagi Perantara/ <i>Intermediary</i>	11 (23%)	0 (0%)	36 (77%)	47 (100%)
3.	Pedoman Perilaku bagi Penyedia Barang & Jasa	7 (15%)	10 (21%)	30 (64%)	47 (100%)

■ Ya
■ Sebagian
■ Tidak

Highlight :

Mayoritas BUMD belum mengatur kebijakan ruang lingkup kebijakan antikorupsi perusahaan bagi direksi dan karyawan, perantara dan penyedia barang & jasa.

DIMENSI 3: PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN INTERNAL

No	Indikator	Ya	Sebagian	Tidak	Jumlah
1.	Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan	17 (36%)	1 (2%)	29 (62%)	47 (100%)
2.	Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	8 (17%)	10 (21%)	29 (62%)	47 (100%)
3.	Kebijakan terkait larangan Nepotisme, Favoritisme, Klientelisme, dan Patronase	6 (13%)	4 (9%)	37 (79%)	47 (100%)
4.	Kebijakan larangan Perdagangan Pengaruh	3 (6%)	1 (2%)	43 (91%)	47 (100%)
5.	kebijakan Anti-Pencucian Uang	6 (13%)	0 (0%)	41 (87%)	47 (100%)
6.	Kebijakan <i>Revolving Door</i>	0 (0%)	0 (0%)	47 (100%)	47 (100%)
7.	Kebijakan <i>Cooling-off Period</i>	0 (0%)	1 (2%)	46 (98%)	47 (100%)
8.	Kebijakan <i>Open Contracting</i> atau transparansi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ)	11 (23%)	0 (0%)	36 (77%)	47 (100%)

Highlight:

Mayoritas BUMD di lima provinsi tidak memiliki kebijakan antikorupsi dan risiko pencegahan benturan kepentingan

DIMENSI 4: PENGANGKATAN PIMPINAN, PEMBERIAN DONASI POLITIK DAN KEBIJAKAN PROGRAM CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

No	Indikator	Ya	Sebagian	Tidak	Jumlah
1.	Uji Tuntas Integritas (<i>Integrity Due Diligence</i>) dalam pengangkatan pimpinan BUMD	13 (32%)	0 (0%)	34 (68%)	47 (100%)
2.	Larangan Politisi tidak dapat menjadi pimpinan BUMD	9 (19%)	0 (0%)	38 (81%)	47 (100%)
3.	Politically-Exposed Persons (PEPs) pada pimpinan BUMD	16 (34%)	0 (0%)	31 (66%)	47 (100%)
4.	Kebijakan mengenai donasi politik	15 (32%)	0 (0%)	32 (68%)	47 (100%)
5.	Transparansi dana CSR (Corporate Social Responsibility)	18 (38%)	0 (0%)	29 (62%)	47 (100%)
6.	Alokasi dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) kepada lembaga, kelompok atau organisasi masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan pimpinan tinggi perusahaan	14 (30%)	0 (0%)	33 (70%)	47 (100%)

Highlight :

Mayoritas BUMD belum melakukan uji tuntas integritas dalam seleksi pimpinan perusahaan

DIMENSI 5: SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN PERLINDUNGAN PELAPOR DAN KERAHASIAAN

No	Indikator	Ya	Sebagian	Tidak	Jumlah
1.	Sistem Pelaporan Pelanggaran yang menjamin tidak adanya risiko tindakan balasan/retaliasi	21 (45%)	0 (0%)	26 (55%)	47 (100%)
2.	Sistem Pelaporan Pelanggaran secara anonim dan adanya jaminan kerahasiaan identitas pelapor	11 (23%)	14 (30%)	22 (47%)	47 (100%)

Highlight :

Mayoritas BUMD sudah memiliki kanal pelaporan pelanggaran, akan tetapi belum didukung dengan kebijakan perlindungan dan menjamin kerahasiaan pelapor.

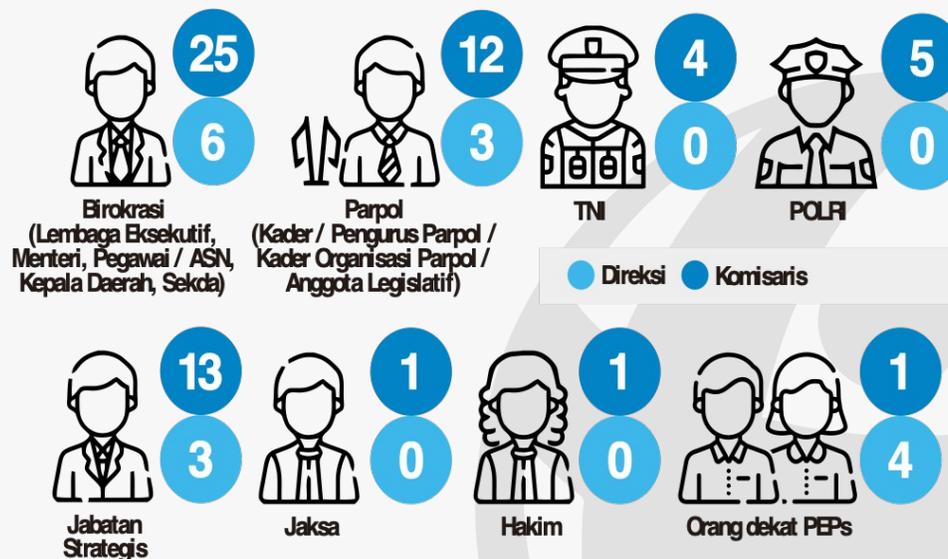
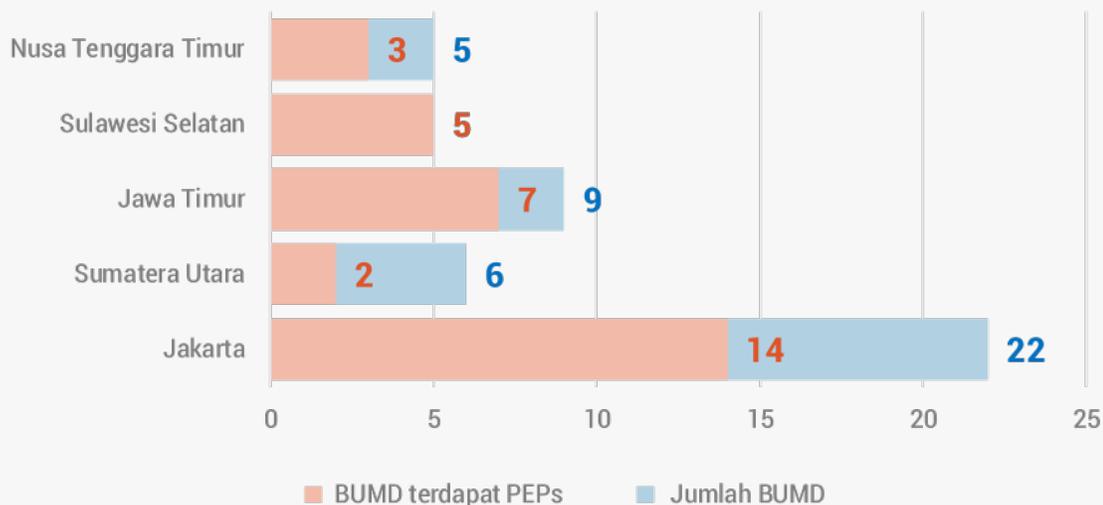
DIMENSI 6: PEMANTAUAN PROGRAM ANTIKORUPSI

No	Indikator	Ya	Sebagian	Tidak	Jumlah
1.	Pelatihan antikorupsi bagi seluruh karyawan dan Pimpinan Perusahaan	8 (17%)	14 (30%)	25 (53%)	47 (100%)
2.	Monitoring secara berkala terhadap implementasi program antikorupsi	9 (19%)	3 (7%)	35 (74%)	47 (100%)

Highlight :

Mayoritas BUMD di lima provinsi tidak memiliki kebijakan pelatihan antikorupsi dan tidak melaksanakan pemantauan terhadap program antikorupsi.

POLITICALLY EXPOSED PERSONS (PEPS) DI BUMD



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan BUMD
- Perlu menyusun program pembinaan BUMD yang lebih terstruktur
- Perlu menyusun aturan mengenai penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

PEMERINTAH DAERAH

- Melakukan pendampingan, pemantauan dan evaluasi terhadap kewajiban BUMD untuk menyusun laporan tahunan dan dapat dipublikasikan kepada publik.
- Mewajibkan BUMD menerapkan prinsip pencegahan korupsi secara konsisten.
- Memberikan penghargaan kepada BUMD dan pimpinan BUMD yang berprestasi
- Memperbaiki sistem rekrutmen pimpinan BUMD agar dapat menghasilkan pimpinan BUMD yang memiliki integritas dan kompetensi yang diperlukan.
- Terhadap BUMD yang telah mengalami kerugian maka harus dilakukan kajian kelayakan usaha terhadap BUMD tersebut.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

- Mewajibkan setiap BUMD untuk menerapkan program antikorupsi.
- Mengintegrasikan sistem pendukung di dalam program antikorupsi BUMD dengan sistem yang dikembangkan di KPK.
- Bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan penilaian terhadap penerapan program antikorupsi setiap BUMD.
- Perlu memasukkan topik ini dalam pencapaian target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- Perlu memonitoring penilaian untuk memastikan pembinaan berjalan dengan baik.

TERIMA KASIH

